

KONFLIK ETNIS DI XINJIANG: KEBIJAKAN MONOKULTURAL DAN KEPENTINGAN NEGARA CHINA TERHADAP KEUTUHAN WILAYAH

Oleh

Gita Karisma^{*)}

^{*)} Staf Pengajar Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung

ABSTRAK

Tulisan ini fokus pada konflik Xinjiang sebagai salah satu kasus konflik internal yang terjadi di China. Sebagai negara maju, China masih tidak terlepas dari masalah konflik internal. Konflik Xinjiang ialah konflik antar etnis Uighur dan Han yang kemudian berkembang menjadi gerakan separatisme. Berdasarkan sejarahnya, maka konflik ini dipicu ketimpangan ekonomi, ketidakpuasan, ketidakadilan, dan kekerasan yang secara simultan bergulir di Xinjiang. Etnis Uighur merupakan etnis muslim mengalami perseteruan dengan pemerintah otoritas China. Pada perkembangannya, muncul beberapa gerakan separatisme di Xinjiang yang menyulut respon militer dari Pemerintah China. Pemerintah China bagaimanapun akan berupaya menjaga keutuhan wilayah dan tidak akan melepaskan Xinjiang. Keberlangsungan konflik ini salah satunya disebabkan oleh kepentingan negara China terhadap Xinjiang. Xinjiang merupakan wilayah potensial bagi China, baik secara geografi maupun ekonomi.

Kata kunci: *Xinjiang, konflik internal, konflik etnis, kepentingan negara, separatisme, identitas.*

PENDAHULUAN

Perang Dunia I dan II telah menjadi catatan kelam sejarah dunia. Dua perang besar ini menunjukkan bagaimana Perang besar antar negara dapat terjadi (*interstate conflict*) berikut dampak besar yang diakibatkannya terhadap peradaban manusia. Menyusul setelahnya, pada era perang Dingin, masyarakat internasional masih harus dihantui akan ketakutan kemungkinan pecahnya perang antar negara (*inter-state conflict*) kembali karena persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Konflik antar negara menjadi hal yang mengerikan bagi masyarakat internasional karena membawa dampak kehancuran dan kematian luar biasa.

Ketakutan akan perang antar negara belum juga berakhir, hingga pasca Perang Dingin muncul ancaman baru yang tidak kalah menakutkan, yaitu konflik internal (*intra-state conflict*). Konflik internal merupakan bentuk perang baru yang terjadi di dalam negara tertentu baik antar-masyarakat maupun antara pemerintah dengan masyarakat. Pasca Perang dingin, intensitas konflik internal bahkan lebih besar ketimbang dengan konflik antar negara yang telah populer sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Wallensteen dan Sollenberg

menunjukkan bahwa dari 110 konflik utama yang melibatkan kekerasan bersenjata pada tahun 1990-1999, hanya 7 konflik yang merupakan konflik antar negara (interstate) dan 103 sisanya merupakan konflik internal, kecuali kasus Perang Teluk dan Afghanistan, hampir semua perang yang terjadi Pasca Perang dingin merupakan konflik internal di suatu negara, sedangkan konflik klasik antar negara sangat jarang terjadi (Widjajanto, 2001).

Permasalahan konflik internal kerap terjadi khususnya dinegara berkembang, terutama konflik tersebut berakar dari instabilitas dalam negeri dan lemahnya stabilitas ekonomi suatu negara (Creveld, 1991). Beberapa kawasan yang tidak terlepas dari konflik internal ialah negara-negara di kawasan Afrika berikut juga negara-negara dikawasan Eropa Timur yang merupakan bekas satelit Uni Soviet, yang merupakan negara berkembang.

China menjadi negara yang cukup menarik karena mengalami cukup banyak masalah konflik internal. Sebagaimana konsep LIC umumnya terjadi di negara berkembang, berbeda halnya dengan China. Meskipun China saat ini sudah menjadi negara maju dengan tingkat perekonomian besar namun nyatanya, negara ini belum dapat melepaskan diri dari ancaman konflik internal.

China telah menjadi negara yang besar terutama sejak tahun 2001 dan kian meningkat ditahun 2008 sampai 2014. *From 2008 to 2012, China's real GDP growth averaged 9.2%. However, the economy has shown signs of slowing. Real GDP grew by 7.8% in 2012 and is projected to grow at the same level in 2013* (Morrison, 2012). Pada tahun 2014, data dari World Bank menunjukkan GNI China adalah sebesar US\$10,094 Trillion yang menempatkana China di nomor dua dibawah Amerika Serikat (The World Bank, 2016). Sedangkan GDP China di tahun 2014 ialah sebesar US\$10,35 Trillion dan menjadi nomor dua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dengan GDP sebesar US\$17,419 Trillion (The World Bank, 2016). Beberapa pengamat ekonomi bahkan meramalkan China mungkin dapat menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai *the world's largest economy* dalam beberapa tahun kedepan (Morrison, 2012).

Kenyataan angka pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata tidak cukup menghindarkan China dari kemelut konflik internal. China bahkan tidak hanya memiliki satu atau dua masalah konflik internal. Beberapa masalah seperti Tibet, kebijakan One China policy terhadap Taiwan, serta Xinjiang menjadikan negara ini semakin menarik untuk dikaji. Salah satu kasus konflik Internal ialah Kerusuhan Xinjiang. Xinjiang merupakan salah satu provinsi sebelah Barat Laut China yang sering berbenturan dengan kepentingan politik pemerintah Beijing yang mayoritas China Han. Xinjiang merupakan contoh konflik internal yang cukup menarik di China karena merupakan bentuk konflik antar etnis yang kemudian berkembang menjadi gerakan separatisme. Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut perihal konflik internal Xinjiang dan penyebab konflik internal di wilayah China tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Pada tahun 2007, Michael Clarke seorang doktor dari Griffith University, yang banyak fokus pada penelitian mengenai China pada tahun 2007 menulis Jurnal mengenai *China's "War on Terror" in Xinjiang: Human Security and the Causes of Violent Uighur Separatism*. Penelitian ini mengangkat masalah Xinjiang kurun waktu 1949-2006. Clarke menitikberatkan penelitiannya pada bagaimana menjelaskan hubungan antara kelompok Terorisme dengan etnis Uighur. Michael Clarke umumnya berasumsi bahwa pembontakan Xinjiang merupakan bentuk Terorisme. Kemudian, Clarke (2007) menemukan bahwa

beberapa kelompok pemberontak Uighur memiliki hubungan dengan kelompok Terorism Turki dan Afghanistan.

Penelitian kedua, mengenai Xinjiang juga dilakukan sebelumnya oleh Dwyer (2005) dengan judul *The Xinjiang Conflict: Uyghur Identity, Language Policy, and Political Discourse*. Dwyer (2005) mengidentifikasi Identitas Uighur memiliki hubungan dengan Turki terutama Asia Tengah. Masalah konflik di Xinjiang menjadi semakin buruk akibat perbedaan identitas agama dan bahasa antara etnis Uighur dengan mayoritas Han. Kerusuhan di Xinjiang ditujukan untuk liberalisasi China dari agama dan kebijakan linguistik (Dwyer, 2005). Konflik ini berkembang menjadi gerakan separatism dan seringkali dikaitkan dengan terorisme.

Perkembangan terkini, hingga Desember 2016, Xinjiang masih menjadi wilayah dengan isu konflik antara etnis Uighur dengan pemerintah China. Oleh karena itu, menarik untuk mengetahui penyebab konflik Uighur di China yang berkembang dari konflik antar etnis, menjadi separatisme kemudian terorisme. Penelitian ini akan fokus pada penyebab konflik dari perspektif kepentingan negara. Penelitian memiliki perbedaan fokus dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada tindak terorisme serta isu identitas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu studi kasus. Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif dan kuantitatif baik data primer maupun sekunder. Sedangkan teknik analisa data yang dipakai ialah dengan proses *tracing*. Proses *tracing* merupakan salah satu metode dalam penelitian kualitatif, terutama dalam kajian studi kasus. Proses ini juga mencoba membuktikan kebenaran teori dan menguji hubungan kausalitas. Berdasarkan definisinya, proses *tracing* merupakan instrumen untuk membuat deskripsi dan inferensi sebab-akibat dari sekumpulan fakta yang menjadi bagian dari suatu fenomena (Collier, 2011).

PEMBAHASAN

Konflik Internal

Konflik internal merupakan segala bentuk pertikaian politik dengan kekerasan yang berpotensi menimbulkan kekerasan yang bersumber dari faktor-faktor dalam negara/intrastate daripada faktor eksternal atau antarnegara/interstate (Brown, 2001). Beberapa konflik yang dapat dikategorikan ke dalam konflik internal misalnya, konflik etnis, gerakan separatisme, *power struggle* yang melibatkan pemimpin sipil dan militer.

Brown (1996) mengidentifikasikan empat faktor sebagai penyebab konflik internal, diantaranya, pertama, *structural factors* misalnya karena lemahnya legitimasi politik, kedua, *political factors* misalnya diskriminasi politik, *civic nationalism*, dan *ethnic nationalism*, ketiga, *economic/social factors* yaitu menyangkut masalah ekonomi ataupun diskriminasi sistem ekonomi, keempat, *cultural/perceptual factors* misalnya adanya diskriminasi budaya atau mengucilkan kaum minoritas. Selain itu, faktor lain juga diantaranya dijelaskan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sebab-Sebab Utama dan Sebab-Sebab Pemicu Konflik Internal

Sebab Utama (<i>Underlying Causes</i>)	Sebab Pemicu (<i>Proximate Causes</i>)
Faktor Struktural : <ul style="list-style-type: none"> • Negara yang lemah • Kekhawatiran tentang keamanan internal • Geografis etnis 	Faktor Struktural : <ul style="list-style-type: none"> • Negara yang sedang runtuh/gagal • Perubahan perimbangan kekuatan militer • Perubahan pola-pola demografis
Faktor Politik : <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga politik yang diskriminatif • Ideologi nasional yang eksklusif • Politik antar kelompok • Politik elit 	Faktor Politik : <ul style="list-style-type: none"> • Transisi politik • Ideologi eksklusif yang semakin berpengaruh • Persaingan antarkelompok yang semakin tajam • Pertarungan kepemimpinan yang semakin tajam
Faktor Ekonomi/Sosial : <ul style="list-style-type: none"> • Masalah ekonomi • Sistem ekonomi yang diskriminatif • Pembangunan ekonomi dan modernisasi Faktor Sosial Budaya : <ul style="list-style-type: none"> • Pola diskriminasi budaya • Sejarah kelompok yang bermasalah 	Faktor Ekonomi/Sosial : <ul style="list-style-type: none"> • Masalah ekonomi yang semakin parah • Ketimpangan ekonomi yang semakin lebar • Pembangunan ekonomi dan modernisasi yang cepat Faktor Sosial Budaya : <ul style="list-style-type: none"> • Pola diskriminasi budaya yang semakin kuat • Penghinaan etnis dan propaganda

Sumber: Hermawan (2007)

Masalah konflik internal ini menjadi sangat penting karena pada titik tertentu konflik internal yang bisanya bersifat intra state dapat berkembang menjadi konflik inter state. Dalam konteks Cina, konflik intra state yang sulit diselesaikan cenderung akan mengundang keterlibatan actor diluar negara yaitu negara tetangga China seperti Asia Selatan dan Tengah. Beberapa isu yang memicu konflik dengan negara tetangga misalnya yang berkaitan dengan isu penyelundupan senjata maupun masalah pengungsi. Hal tersebut akhirnya dapat merusak hubungan antar negara yang bertetangga.

Selain itu, konflik internal Cina yang bisa berkembang menjadi interstate juga turut menyebabkan kerentanan *instability* terutama bagi kawasan yang secara geopolitik berdekatan, seperti Asia Tenggara dan khususnya Indonesia. Konflik Internal di China sebetulnya bukan merupakan konflik yang cukup besar, sebagaimana yang tertera pada Tabel 2 menjelaskan perihal beberapa level konflik etnis di dunia.

Konflik etnis yang terjadi di China terutama terkait etnis Han merupakan konflik internal yang sesungguhnya belum memiliki level konflik etnis yang serius. Konflik yang terjadi di China masih merupakan konflik yang intensitasnya rendah. Konflik internal China dapat dikategorikan dalam konflik intensitas rendah (*low intensity conflict*). Low Intensity Conflict (LIC) ialah sebuah konsep kombinasi dari politik dan ekonomi terkait kepentingan sebuah kelompok tertentu yang kemudian berujung pada penggunaan instrumen militer atau kekuatan bersenjata lainnya dalam sebuah perang atau konflik (Manual, 1990).

Karakter dari LIC biasanya dapat ditandai dengan adanya perjuangan kepentingan politik dan militer yang bersifat meluas dengan durasi konflik yang panjang karena tekanan dari kegagalan upaya diplomatik yang juga sering disusul dengan aksi teror dan terjadinya pemberontakan-pemberontakan. LIC sebagai sebuah kekerasan politik dari sebuah kepentingan politik suatu negara terhadap suatu kelompok tertentu merupakan sebuah pertemuan konflik antara angkatan bersenjata pihak pemerintah atau komunitas yang lebih

dominan melawan kelompok musuh yang lebih minoritas dan biasanya mengalami keterbatasan persenjataan (Manual, 1990).

Tabel 2. Level Konflik Etnis (*Examples and Cases Discussed at Conference with extra cases mentioned for purposes of illustration*)

<i>Levels of Ethnic Conflict</i>	<i>Cases (examples in italics not presented during the conference)</i>	<i>Remarks</i>
<i>Genocide</i>	<i>Armenians, 1915 Jews, 1939-1945 Cambodia, 1975-79 Rwanda, 1994</i>	<i>There will be a paper in the volume about the Jewish Holocaust, and though it was not presented at the conference, much that was said referred to that case.</i>
<i>War short of genocide</i>	<i>Kurds in Turkey, now East Timor, now Yugoslav Wars, 1990s Guatemala, 1970s/80s Sri Lanka, now</i>	<i>This is a much more common type of case than outright genocide. It can, however, produce many massacres. In Guatemala, the war was largely but not entirely fought along ethnic lines.</i>
<i>Conflict, low level war</i>	<i>Israel-Occupied West Bank/Gaza, 1967-now Northern Ireland, 1969-1998 South Africa before 1990 Many cases in Latin America</i>	<i>Even more common, these types of semi-wars have occurred in dozens of cases. They sometimes heat up or cool down, but can remain unresolved for decades. These are the kinds of ethnic wars most likely to be stopped with proper mediation, but that can escalate if mishandled.</i>
<i>Conflict, no war but occasional violence</i>	<i>Israel-Israeli Arabs, 1948-now U.S. South before 1970s Many cases in India Southern Mexico, now</i>	<i>Very common, such cases may be held in check by effective repression and co-optation, as in Israel and Mexico. In India, they occasionally flare into more severe warfare, as in Kashmir.</i>
<i>No serious conflict despite high level of awareness about and important political role of ethnic and religious differences</i>	<i>Switzerland-regions Germany-regions China-Han regions Tanzania-many tribes Finland-Swedes Paraguay-Indians</i>	<i>There are many dozens of examples, and a few illustrations are given here to show that most potential ethnic conflicts need not be actualized, much less turn into wars.</i>
<i>Past Conflict Followed by Reconciliation</i>	<i>South Africa Northern Ireland Malaysia U.S. South Basques in Spain Muslims in Thailand</i>	<i>In all these cases, tensions in the recent past either produced wars or high levels of confrontation that seemed to be heading toward civil war; but all have produced some level of reconciliation in the 1980s and 90s.</i>

Sumber: Chiot (1998)

Berdasarkan penjelasan konsep ini, maka Xinjiang jelas merupakan konflik internal yang berintensitas rendah. Meskipun begitu, konflik ini merupakan konflik yang cukup

rumit dan berlarut-larut. Di bawah ini akan dijelaskan sejarah konflik Xinjiang dimana konflik ini telah bergerak dari konflik antar etnis menjadi separatisme.

Konflik Xinjiang: Dari Konflik Etnis, Separatisme, dan Terorisme

Kerusuhan di Xinjiang ini sesungguhnya memiliki sejarah yang cukup panjang. Masalah ini bisa dirunut balik hingga beberapa dekade, dan bahkan ke penaklukan wilayah yang kini disebut Xinjiang oleh Dinasti Qing Manchu pada abad ke-18. Pada tahun 1940-an, muncul Republik Turkestan Timur di sebagian Xinjiang, dan banyak warga Uighur merasakan itu menjadi hak asasi mereka. Namun, kenyataannya, mereka menjadi bagian Republik Rakyat Cina pada tahun 1949, dan Xinjiang dinyatakan sebagai salah satu kawasan otonomi Cina dengan mengesampingkan fakta bahwa mayoritas penduduk di sana pada saat itu orang Uighur. Kekuasaan Uighur pada akhirnya banyak dikendalikan oleh sekretaris jenderal daerah partai Komunis China dan bukan oleh gubernur setempat.

Di bawah pemerintahan Partai Komunis, terjadi pembangunan ekonomi yang sangat gencar, dan banyak warga China dari bagian timur masuk dan mencari penghidupan layak di wilayah Uighur ini. Kemampuan yang memadai dan lebih terlatih serta kemampuan bahasa China yang baik mendorong pemuda dari golongan Han lebih banyak diserap lapangan pekerjaan.

Pada akhirnya terjadi kesenjangan ekonomi yang memicu pertentangan antara orang Uighur dan Han. Dalam perkembangan yang lebih baru, anak-anak muda Uighur terdorong untuk meninggalkan Xinjiang untuk mendapatkan pekerjaan di belahan lain Cina, dan proses ini sudah berlangsung secara informal dalam beberapa tahun. Akan tetapi usaha mereka ini hanya menyebabkan orang Uighur makin terpinggirkan karena umumnya kaum wanita yang keluar ke wilayah China lain hanya menjadi budak dan jenis pekerjaan lainnya yang tidak jauh lebih baik.

Di sisi lain, diskriminasi terhadap kegiatan beragama juga semakin dirasakan oleh kaum Uighur. Islam adalah bagian integral kehidupan dan identitas warga Uighur Xinjiang, dan salah satu keluhan utama mereka terhadap pemerintah Cina adalah tingkat pembatasan yang diberlakukan oleh Beijing terhadap kegiatan keagamaan mereka (republika.co.id., 10/7).

Jumlah masjid di Xinjiang merosot jika dibandingkan dengan jumlah pada masa sebelum tahun 1949, dan institusi keagamaan itu menghadapi pembatasan yang sangat ketat. Anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak diizinkan beribadah di masjid. Demikian juga pejabat Partai Komunis dan aparat pemerintah. Lembaga-lembaga Islami lain yang dulu menjadi bagian sangat penting kehidupan keagamaan di Xinjiang dilarang, termasuk persaudaraan Sufi, yang berpusat di makam pendirinya dan menyediakan jasa kesejahteraan dan semacamnya kepada anggotanya. Semua agama di Cina dikendalikan oleh Administrasi Negara untuk Urusan Agama, tapi pembatasan terhadap Islam di kalangan warga Uighur lebih keras daripada terhadap kelompok-kelompok lain, termasuk etnis Hui yang juga muslim, tapi penutur bahasa Cina (republika.co.id., 10/7).

Salah satu hal yang semakin mendorong memanasnya hubungan etnis Uighur dengan pemerintah China adalah dengan adanya gerakan kemerdekaan di Xinjiang. Sejak lama sebetulnya kelompok separatis sudah ada di Xinjiang, namun keberadaan dan penentangan mereka terhadap pemerintah belum begitu berani. Baru pada tahun 1990-an, setelah ambruknya Uni Soviet dan munculnya negara-negara muslim independen di Asia Tengah, terjadi peningkatan dukungan terbuka atas kelompok-kelompok "separatis", yang memuncak pada unjuk rasa massal di Ghulja pada tahun 1995 dan 1997.

Pemerintah menyikapi keras pengunjuk rasa dengan penggunaan kekuatan luar biasa, dan para aktivis dipaksa keluar dari Xinjiang ke Asia Tengah dan Pakistan. Kelompok pejuang kemerdekaan Xinjiang sejak itu terpaksa bergerak di bawah tanah. Penindakan tegas pemerintah China semakin keras sejak digulirkannya kampanye “*Strike Hard*” pada 1996. Kebijakan ini mencakup kebijakan memperketat pengendalian terhadap kegiatan agama, pembatasan pergerakan kelompok atau orang tertentu yang dicurigai dan tidak menerbitkan paspor dan menahan orang-orang yang didicurigai mendukung separatis dan anggota keluarga mereka. Ada juga kebijakan *Go West Policy* pada tahun 2000 yang mendorong semakin banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang.

Di masa lalu, pemerintah China juga mempersalahkan Gerakan Islami Turkestan Timur memicu kerusuhan, meski tidak ada bukti bahwa gerakan ini pernah muncul di Xinjiang. Sikap pemerintah China ini, justru sebaliknya semakin memperbesar kebencian etnis Uighur terhadap pemerintah Cina dan warga Cina etnis Han. Warga di Xinjiang juga semakin takut akan pemerintah China. Aparat di Beijing tidak bisa menerima bahwa kebijakan mereka sendiri di Xinjiang mungkin penyebab konflik, dan berupaya mempersalahkan orang luar yang mereka tuding memicu tindak kekerasan. Itu juga terjadi dalam kasus Dalai Lama dan Tibet.

Pada perkembangannya, hingga tahun 2015 serangan masih terus dilancarkan Pemerintah China. Diawali dengan penyerangan sekelompok orang tak dikenal ke kantor halaman pemerintah China di Xinjiang, Pemerintah kemudian membalas serangan tersebut menewaskan 16 orang. Sedangkan otoritas Xinjiang menyebut pasukan keamanannya menewaskan 28 teroris yang terlibat dalam serangan itu. Serangan itu dilaporkan menewaskan 16 orang. Sedangkan otoritas Xinjiang menyebut pasukan keamanannya menewaskan 28 teroris yang terlibat dalam serangan itu (news.detik.com, 29/12). Sampai dengan saat ini cukup sulit untuk mendapatkan laporan independen dari perkembangan sesungguhnya konflik internal di Xinjiang. Hal ini dikarenakan sulitnya akses liputan langsung serta lambannya perilsan informasi soal berbagai insiden oleh Otoritas China.

Penyebab Konflik Internal di China

Sejak kurun waktu 1940-1990an, masalah Xinjiang sesungguhnya masih merupakan konflik etnis antara etnis Han dan Etnis Uighur. Berdasarkan penjelasan sejarah di atas, konflik ini dipicu oleh ketimpangan ekonomi yang didominasi oleh etnis Han. Kemiskinan dan kecemburuan yang diperburuk dengan ketidakadilan dari pemerintah Cina terhadap hak beragama etnis Uighur yang mayoritas muslim menjadikan konflik semakin memburuk. Pemerintah China memang cukup keras dan terlalu fokus pada homogenitas sehingga memperlebar jurang ketimpangan antara Han dan etnis lain di China. *The pressure of China's monoculturalist policy has reframed the psychologically healthy ethnic sentiment of being distinct (that of being “different than Hans”) into a politicized antimajority feeling (being “anti-Han”)* (Dwyer, 2005, p. 58). Berbagai kebijakan China yang represif serta monokultural menyebabkan perbedaan antara identitas lain dengan identitas Han menjadi meruncing. Dwyer (2005) misalnya mengatakan buruknya hubungan ini disebabkan kebijakan kultural bahasa dan agama. Meskipun China dalam UU Kewarganegaraan 1984 dan UU Otonomi Daerah tahun 1984 telah memberi tempat bagi hak linguistik untuk penutur bahasa minoritas di Cina, namun pelaksanaan hukum tersebut lemah. Pada akhirnya, “*Minority nationalities such as the Uyghurs who see no future in participating in China's society may eventually decide to opt out*” (Dwyer, 2005, p. 65).

Pada tahun 1990-an, setelah ambruknya Uni Soviet dan munculnya negara-negara muslim independen di Asia Tengah, memicu kemunculan kelompok-kelompok “separatis” di Xinjiang, yang memuncak pada unjuk rasa massal di Ghulja pada tahun 1995 dan 1997. Pemerintah menyikapi keras pengunjuk rasa dengan penggunaan kekuatan luar biasa, dan para aktivis dipaksa keluar dari Xinjiang ke Asia Tengah dan Pakistan. Cina mengeluarkan kebijakan “*Strike Hard*” pada 1996. Kebijakan ini mencakup kebijakan memperketat pengendalian terhadap kegiatan agama, pembatasan pergerakan kelompok atau orang tertentu yang dicurigai dan tidak menerbitkan paspor dan menahan orang-orang yang didicurigai mendukung separatis dan anggota keluarga mereka. Ada juga kebijakan Go West Policy pada tahun 2000 yang mendorong semakin banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang. Hingga tahun 2016 bahkan pemerintah China, merilis larangan adat bagi Anggota partai, kader, PNS, mahasiswa, dan anak di bawah umur untuk tidak boleh berpuasa selama Ramadhan dan tidak harus mengambil bagian dalam kegiatan keagamaan Islam di Uighur (internasional.kompas.com, 6/6).

Disatu sisi, faktor yang menyebabkan Konflik internal Xinjiang berdasarkan penjelasan sejarah di atas adalah karena ketidakpuasan, kemiskinan, kekerasan, dan juga ketidakstabilan. Interaksi tersebut telah menciptakan sebuah kombinasi permasalahan yang kompleks dan kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terbentuk dan berkembangnya Konflik Xinjiang menjadi LIC. Masyarakat sipil di Xinjiang telah mengalami banyak kekerasan akibat langkah militer yang ditempuh oleh pemerintah China, sehingga masyarakat semakin sulit menjadi kooperatif. Etnis Uighur yang terpinggirkan akhirnya memilih untuk menuntut hak merdeka dan melancarkan aksi separatisme dan hal ini semakin memperpanjang keberlangsungan konflik internal ini.

Disisi lain, penyebab berlarutnya konflik Internal di China dapat dilihat dari sisi pemerintah Cina. China merupakan salah satu negara yang berasal dari salah satu peradaban tertua di dunia. Karena itu juga telah menyebabkan China memiliki catatan sejarah panjang dan dinamika politik yang cukup rumit. Salah satu masa dimana China mengalami perubahan besar adalah pada tahun 1949 yaitu masa dimana China berhasil ditaklukan komunis dibawah payung kekuasaan Mao. Sejak saat itu terjadi banyak polemik terhadap pemerintahan sah China. Sistem politik komunisme yang dianut China yang berlanjut sampai saat ini menjadikan pemerintahan China menjadi sentralistik dan sulit menerima heterogenitas. China akhirnya mengambil langkah militer untuk mengatasi masalah konflik internalnya dan mengambil langkah militer. Hal ini justru membuat etnis Uighur semakin terdesak, dan akhirnya muncul beberapa gerakan terorisme. Tudingan yang terus menerus memojokan etnis Uighur memperburuk konflik di Xinjiang ini.

Sebagai sebuah negara China sampai saat ini terus mempertahankan *One China Policy*. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan utama China adalah kedaulatan, sehingga tentu China tidak akan membiarkan terlepasnya satu wilayah pun dari China. Berbagai penyebab ini tentu tidak dapat dilepaskan dari betapa berharganya Xinjiang bagi pemerintah China. Xinjiang berarti penting baik secara strategis maupun ekonomis bagi China.

Arti Penting Xinjiang bagi Pemerintah China

China merupakan negara yang memiliki beragam etnis di luar 56 etnis yang diakui pemerintah Beijing. Di antara ke 56 etnis tersebut, etnis terbesar ialah Han, sedangkan etnis Uyghur hanya berjumlah ± 8.399.393 berdasarkan sensus pada 2010. Jumlah tersebut tersusun atas orang keturunan China, Kazakhstan (berjumlah 223.100 pada tahun 2009), dan Kirgiztan (berjumlah 49.000 pada tahun 2009).

Etnis Uygur memiliki bahasa dan tulisan sendiri yang masuk dalam kelompok Turkish dari Filum Altaic. Nama Uygur sendiri berasal dari bahasa Turki yang artinya “sekutu” atau “asisten” (travelchinaguide.com, n.d). Secara historis etnis Uighur memiliki catatan panjang sebagai komunitas yang memiliki hubungan dagang dan komunikasi dengan serangkaian wilayah lain di Asia Tengah. Penemuan ladang minyak di wilayah tinggal etnis Uigur yakni Xin Jiang, mengakibatkan arus China Han mulai membanjiri wilayah tersebut. Kekhawatiran arus masuk China Han (dalam represi pemerintah dan kolonialisasi) memaksa etnis Uygur menggalakkan kampanye (bahkan sampai menarik simpati internasional) untuk mengklaim kembali tanah mereka, menghentikan tekanan polisi dan keagamaan, hingga pada taraf tertentu muncul separatisme mendukung independensi Uygur menjadi negara berdaulat.

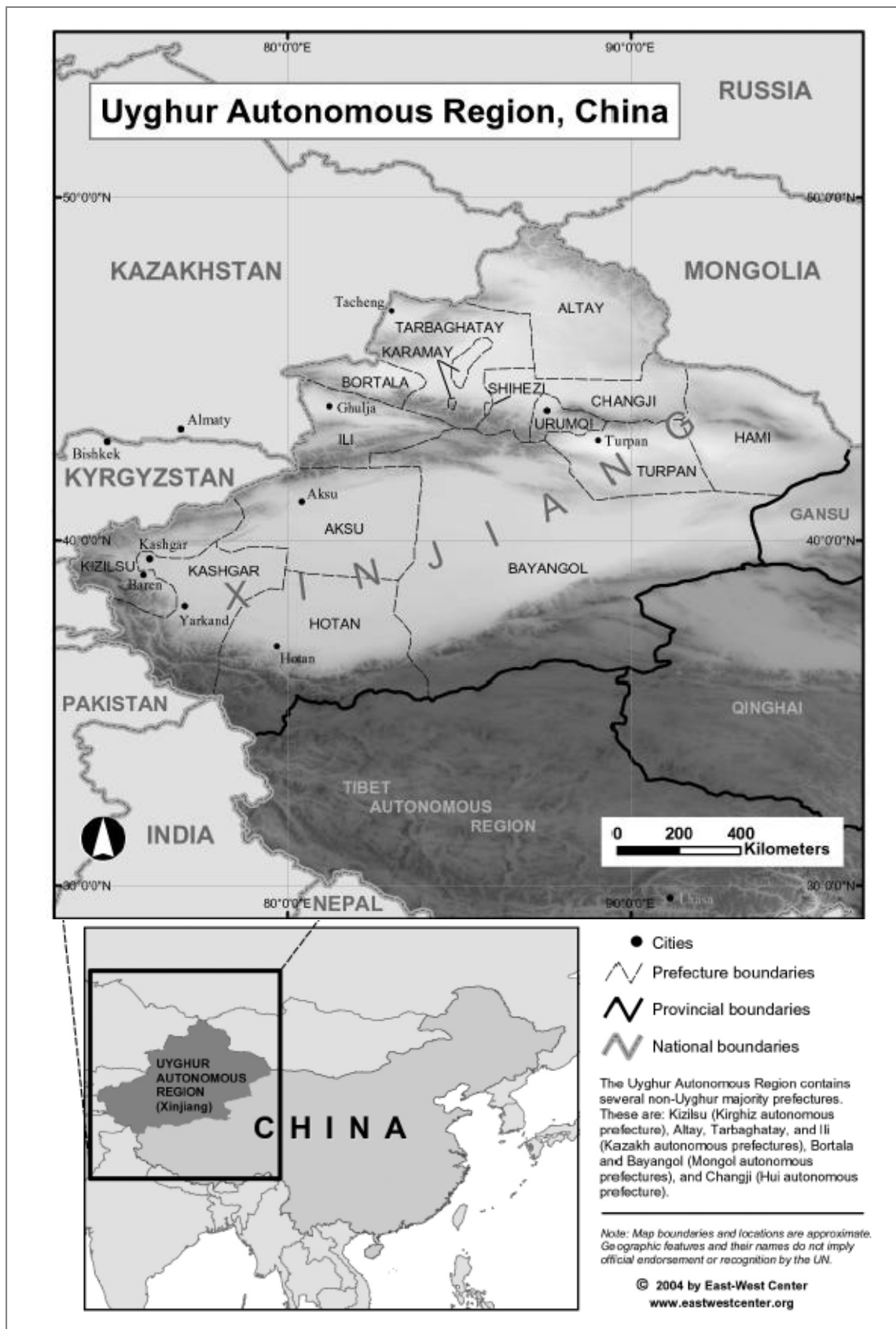
Pemerintah China memang selama ini bersikap cukup keras dalam menyikapi berbagai kerusuhan di Xinjiang. Pemerintah memilih agar persoalan etnis minoritas di Xin Jiang itu dieliminasi secara agresif melalui agresi militer. Berbagai realisasi kebijakan tersebut antara lain terjadinya genosida, “*ethnic cleansing*”, bahkan wanita dan anak-anak menjadi korban. China melakukan tindakan represif dengan alasan utama yang menyangkut kepentingan nasional China yaitu keutuhan wilayah. Hal yang menjadi pertimbangan sendiri bagi pemerintah China mengingat keutuhan wilayah ialah bagian kedaulatan negara yang tidak dapat dielekan oleh negara manapun, ditambah wilayah Xinjiang memang sangat bernilai penting bagi China.

Xinjiang bernilai sangat ekonomis. Terutama sejak penemuan ladang minyak yang menambah posisi Xin Jiang secara geoekonomi lebih penting dan merupakan wilayah paling krusial bagi China. Pemerintah China sudah tentu tidak mau melepaskan wilayah ini begitu saja.

Xinjiang adalah penghasil terbesar kapas, lavender, dan hop. Areal tanaman lavender dan produksinya di Kabupaten Ili merupakan 90% dari total tanaman nasional. Selain itu, dengan padang rumput terbesar kedua, Xinjiang merupakan salah satu daerah peternakan domba dan wol yang menjadi basis produksi di Cina. Xinjiang juga kaya akan sumber daya energi. Wilayah ini memiliki cadangan terbesar minyak, gas alam dan batu bara di dalam negeri. Adapun cadangan batubara sebesar 40% dari total negara. Cadangan minyak dan gas yang ditemukan di Tarim, Junggar dan Turpan-Hami wilayah Xinjiang ialah seperempat dan sepertiga dari total negara. Xinjiang bahkan memiliki sumber daya mineral yang besar juga. Ada lebih dari 130 jenis deposit mineral didirikan. Cadangan beryllium and mica di wilayah adalah yang tertinggi di Cina (<http://china-trade-research.hktdc.com>, 3/2).

Berdasarkan arti penting ekonomis dari wilayah Xinjiang ini, maka penting bagi pemerintah Cina untuk mengamankan wilayah Xinjiang terutama dengan menjaga Xinjiang tetap dalam wilayah bagian China. Pemerintah China cenderung tidak akan membiarkan Xinjiang lepas dari China dan akan mempertahankan keutuhan wilayah China.

Selain itu, berdasarkan gambar di atas secara geopolitik, wilayah Xinjiang memang sangat penting terutama karena wilayah ini merupakan wilayah penyangga atau *buffer zone* bagi China. Xinjiang tidak bisa dilihat hanya bagian dari China tapi juga merupakan bagian dari Asia Tengah. Wilayah ini menjadi semakin penting karena berdekatan dengan Asia Tengah. Xinjiang yang mengalami ketidakstabilan tentu akan mengganggu China. Wilayah ini, akan sangat rentan terutama bisa meningkatkan angka *illegal trafficking* seperti penyelundupan senjata dan *human trafficking* dari dan menuju Asia Tengah.



Sumber: Dwyer (2005)

Di samping itu, dengan berkembangnya isu terorisme menyebabkan kawasan Xinjiang sangat penting dijaga agar tidak mudah menjadi jalan masuk bagi Teroris ke wilayah Cina. Beberapa hal yang disebabkan dari konflik internal Xinjiang tersebut diatas

baik masalah penyelundupan senjata, pengungsi, ditambah terorisme telah memicu hubungan yang buruk antara China dengan Asia Tengah. Padahal menjaga hubungan baik dengan Asia Tengah merupakan hal cukup penting bagi China terutama karena Asia Tengah merupakan sumber cadangan energi dan suplai energi terpenting bagi China saat ini setelah Sudan dan Timur Tengah.

KESIMPULAN

Beberapa faktor penyebab konflik ini adalah faktor historis yang melahirkan kenyataan adanya perbedaan identitas mendasar antara China dengan etnis asli Xinjiang yaitu Uighur. Kedua adalah faktor, ekonomi berupa kesenjangan ekonomi antara etnis Han dengan etnis Uighur. Ketiga, adanya faktor politik yaitu diskriminasi dalam hal beribadat dan lainnya. Adanya ketidakpuasan, kemiskinan, kekerasan, dan juga ketidakstabilan yang dialami etnis Uighur telah menciptakan sebuah kombinasi permasalahan yang kompleks dan kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terbentuk dan berkembangnya Konflik Xinjiang.

Sikap keras pemerintah China dalam menyelesaikan masalah di Xinjiang semakin memperburuk konflik di Xinjiang. Pada akhirnya muncul gerakan separatis Uighur. Pemerintah China justru semakin bertindak keras dan akhirnya terjadi konflik dan pertumpahan darah di Xinjiang. Berbagai kebijakan China yang represif serta monokultural menyebabkan perbedaan dan ketimpangan antara identitas Uighur dengan identitas Han menjadi semakin tajam.

Kepentingan utama China adalah kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah, sehingga tentu China tidak akan membiarkan terlepasnya satu wilayah pun dari China. Sikap pemerintah yang sangat menentang keras separatisme di Xinjiang ini antara lain disebabkan karena memang Xinjiang bernilai sangat strategis dan ekonomis. Secara strategis, Xinjiang merupakan wilayah penyangga dari ancaman masuknya terorisme dari Asia Tengah dan secara ekonomi, Xinjiang memiliki potensi pertanian, peternakan, bahkan Xinjiang merupakan ladang minyak terpenting bagi pemerintah China.

Indonesia dan negara lainnya di dunia internasional sudah selayaknya berhati-hati terhadap maraknya konflik internal di China terutama dalam menyikapi kebijakan *one China policy*. Bukan mustahil, kedepannya konflik internal China bisa berubah menjadi konflik interstate yang berskala lebih besar dan membahayakan stabilitas internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, Michael E. (2001). *Ethnic and internal conflict: causes and implication*”, dalam *Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson and Pamela Aall, Turbulent Peace: the challenges of managing international conflict*. Washington D.C: United State Institute of Peace.
- Brown, Michael. (1996). *The international dimensions of internal conflict*. Cambridge: MIT press.

- China-trade-research.hktdc.com. (2017). *Xinjiang: market profile*. Retrieved from <http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/Facts-and-Figures/Xinjiang-Market-Profile/ff/en/1/1X000000/1X06BVVK.htm>
- Chirot, D. (1998). *Ethnopolitical warfare: causes and solutions*. In Report on the American Psychological Association conference held in Londonderry/Derry, Northern Ireland.
- Clarke, Michael. 2007. China's "war on terror" in xinjiang: human security and the causes of violent uighur separatism. *Regional Outlook Paper*, No. 11, 2007 Griffith Asia Institute.
- Collier, D. (2011). Understanding process tracing. *PS: Political Science & Politics*, 44(4), 823-830.
- Creveld, Martin van. (1991). *Transformation of war*. New York: Free Press.
- Dwyer, A. M. (2005). The Xinjiang conflict: uyghur identity, language policy, and political discourse. *Policy Studies*, (15), 1.
- Hermawan, Y. P. (2007). *Transformasi dalam studi hubungan internasional: aktor, isu dan metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Internasional.kompas.com. (2016). *Otoritas china di xinjiang melarang berpuasa selama ramadhan*. Retrieved from <http://internasional.kompas.com/read/2016/06/06/18373481/otoritas.china.di.xinjiang.melarang.berpuasa.selama.ramadhan>
- Manual, F. (1990). 100-20: Military operations in low-intensity conflict. *Air Force Pamphlet*.
- Morrison, Wayne M. 2012. "China's economic rise: history, trends, challenges, and implications for the United States". *Congressional Research Service*. September 5 2012.
- News.detik.com. (2016). *Lima orang tewas dalam serangan teror di Xinjiang*. Retrieved from <https://news.detik.com/internasional/d-3383623/lima-orang-tewas-dalam-serangan-teror-di-xinjiang>
- Republika.co.id. (2009). *Sejarah muslim Uighur*. Retrieved from <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/09/07/10/61486-sejarah-muslim-uighur>
- The World Bank. (2016). *World development indicators: poverty rates at national poverty lines*. Retrieved from <http://wdi.worldbank.org/table/1.1>
- Travelchinaguide.com. (n.d). *Uygur (Uigur) nationality*. Retrieved from <https://www.travelchinaguide.com/intro/nationality/uigur/>
- Widjajanto, Andi. 2001. Perang internal dalam Proses Pembentukan Negara-Bangsa. *Analisis CSIS*, tahun XXX/2001, No. 1.